



Konsep Umum Evaluasi Kebijakan

General Concepts Policy Evaluation

Warman^{1*}, Laili Komariyah², & Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum³

^{1,2,3}Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

¹Email: warman@fkip.unmul.ac.id, ²Email: laili.komariyah@fkip.unmul.ac.id, ³Email: khairunnisa480@gmail.com

Abstract: Policy evaluation needs to be carried out because not all policies run according to the plans and objectives that have been set. Before carrying out an evaluation, evaluators need to understand the general concept of policy evaluation so that this article is prepared as an initial framework or theoretical study to support another similar research. The preparation of this article used the library research method, namely by collecting various data sources relevant to policy evaluation, then complementing it with the author's thoughts on the topics presented. The results of the discussion explain the meaning of policy evaluation as an analysis effort to find the truth about programs originating from the authorities through the substance/content of the program, implementation and impact of the policy so as to be able to provide objective and valid information regarding the achievements of a program in policy. The purpose of evaluation policy is for: anticipating change, measuring the level of conformity, effectiveness, knowing the impact, as a control, recommendation, explanation, staff development, compliance, accreditation, accountability, providing feedback, political position, developing theory. In terms of time and chronology, evaluation consists of: pre-programmer, on-going and ex-post. Evaluation approaches consist of: quasi-evaluation, formal evaluation and decision evaluation. Evaluation models include: goal-oriented, goal-free, summative, countenance, responsive, CIPP, CSE-UCLA, DEM

Keywords: policy evaluation, objectives of policy evaluation, policy evaluation models, policy evaluation approaches, types of policy evaluation.

Abstrak: Evaluasi kebijakan harus dilakukan karena tidak semua kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sebelum melakukan evaluasi evaluator perlu memahami konsep umum mengenai evaluasi kebijakan sehingga penyusunan artikel ini bertujuan sebagai kerangka awal atau kajian teoritis untuk mendukung penelitian lainnya yang sejenis. Penyusunan artikel dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan sumber data yang relevan dengan evaluasi kebijakan, kemudian dilengkapi dengan pemikiran penulis tentang topik yang di sajikan. Hasil pembahasan menjelaskan pengertian evaluasi kebijakan adalah suatu usaha menganalisis guna mencari kebenaran terhadap program yang berasal dari pihak berwenang melalui substansi/isi program, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut sehingga mampu menyediakan informasi yang objektif dan valid mengenai pencapaian suatu program dalam kebijakan. Tujuan evaluasi kebijakan adalah untuk: mengantisipasi perubahan, mengukur tingkat kesesuaian, efektivitas, mengetahui dampak, sebagai kontrol, rekomendasi, eksplanasi, pengembangan staf, kepatuhan, akreditasi, akuntabilitas, memberikan balikan, posisi politik, mengembangkan teori. Ditinjau dari segi waktu dan kronologi evaluasi terdiri atas: *pre-program*, *on-going* dan *ex-post* Pendekatan-pendekatan evaluasi terdiri atas: evaluasi formal, evaluasi semu dan evaluasi keputusan. Model-model evaluasi di antaranya: berorientasi tujuan, bebas tujuan, Sumatif, *countenance*, responsif, CIPP, CSE-UCLA, DEM.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, tujuan evaluasi kebijakan, model-model evaluasi kebijakan, pendekatan evaluasi kebijakan, tipe evaluasi kebijakan.

How to cite this article:

Warman, W., Komariyah, L., & Khairunnisa, K. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3(SE), 25—32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3iSE.2912>

Article history

Received:
25 November 2023

Accepted:
15 December 2023

Published:
31 December 2023

* Corresponding author



PENDAHULUAN

Kebijakan adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Permatasari, 2020). Kebijakan memerlukan evaluasi untuk dapat meninjau sejauh mana target yang telah tercapai, aspek apa saja yang perlu diperbaiki atau dipertahankan agar menghasilkan kebijakan yang lebih bermanfaat di waktu yang akan datang. Kemajuan dari suatu program yang terdapat pada suatu kebijakan dapat dilihat melalui evaluasi (Prabowo et al., 2022). Evaluasi menjadi patokan bagi kebijakan-kebijakan mendatang yang akan di ambil oleh pemerintah atau pelaksana dan merupakan tahapan akhir dari suatu kebijakan (Permatasari, 2020). Willam N. Dunn berpandangan bahwa evaluasi perlu dilakukan karena masih terdapat kebijakan yang belum berjalan berdasarkan rencana yang ditetapkan di awal (Agustina & Rahaju, 2021). Tidak tercapainya tujuan kebijakan disebabkan oleh kurangnya daya antisipasi para pembuat kebijakan, pemerintah selaku pembuat kebijakan tentu menginginkan agar tujuan dari kebijakan ini dapat terlaksana maka evaluasi kebijakan perlu dilakukan (Dilapanga & Rantung, 2022). Al Hudib & Counsins (2022) mengidentifikasi bahwa evaluasi kebijakan adalah sarana penting untuk membentuk dan mempengaruhi organisasi, namun hingga saat ini hanya sedikit penelitian empiris yang dilakukan untuk memperdalam penelitian tentang ini. Pelaku utama evaluasi kebijakan adalah pemerintah namun terdapat pihak lain yang bersifat independen seperti lembaga penelitian atau universitas yang juga melakukan evaluasi dengan tujuan untuk menunjukkan kesenjangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan berjalan tersebut (Dilapanga & Rantung, 2022). Sebagai seorang evaluator harus memahami konsep umum dari evaluasi kebijakan sebelum melakukan evaluasi untuk itu penulis membuat artikel yang berjudul konsep umum evaluasi kebijakan dengan tujuan dapat menjadi kerangka awal atau kajian teoritis untuk mendukung penelitian lainnya yang sejenis.

METODE

Metode penyusunan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (*library research*) yaitu mencari atau menemukan data dari berbagai sumber yang relevan dengan konsep umum evaluasi kebijakan, kemudian dilengkapi dengan pemikiran penulis tentang topik yang di sajikan. Sumber data yang diperoleh melalui metode studi pustaka berasal dari buku, jurnal dan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengatasi masalah melalui penelaahan kritis (Fadli, 2021). Studi Pustaka adalah bagian mendasar dari suatu kerangka penelitian untuk mendukung penelitian lain yang sesuai dan memperdalam kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu '*evaluation*'; yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penilaian. Akar kata evaluasi dalam bahasa Inggris adalah '*value*'; yang dalam bahasa Indonesia adalah; nilai. William Dun mengartikan bahwa evaluasi adalah melakukan penaksiran (*appraisal*), memberi skor (*rating*), dan menilai (*assessment*), segala hal yang berhubungan dengan cara untuk memproduksi dan melakukan analisis informasi berkaitan dengan nilai dan manfaat dari kebijakan (Hayat, 2019, p. 35). Suchman beranggapan bahwa evaluasi adalah suatu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mendeskripsikan, menemukan, dan memberikan informasi yang bermanfaat guna menilai alternatif keputusan. Hal senada disampaikan oleh Stufflebeam bahwa evaluasi adalah metode sains untuk melakukan tindakan program guna memperoleh ukuran yang objektif dan valid mengenai pencapaian program tersebut. Sementara itu Scriven menyatakan evaluasi adalah proses untuk menentukan manfaat, nilai, atau nilai suatu produk dari proses tersebut. Istilah yang merujuk dari proses ini meliputi: menilai, menganalisis, mengkritik, memeriksa, menilai, memeriksa, meninjau peringkat dan mempelajari (Mergoni & De Witte, 2022).

Evaluasi adalah sebagai tahapan penting yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan (Hajaroh, 2019). Sedangkan Halimah (2020, p. 33) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk memperoleh penilaian yang dilakukan selama kegiatan sedang berjalan ataupun saat telah berakhir. Evaluasi

adalah sebuah prosedur atau kegiatan yang dijalankan dengan proses yang teratur dengan melibatkan sebab-sebab keberhasilan serta kegagalan suatu kebijakan (Prabowo et al., 2022).

Berdasarkan pendapat yang disampaikan di atas, pengertian evaluasi menurut penulis adalah suatu tahapan penting dengan metode sains yang teratur untuk melakukan proses memeriksa, menggambarkan dan menilai dengan melibatkan sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan yang dilaksanakan pada kegiatan berjalan atau telah berakhir hingga memperoleh dan menyediakan informasi yang objektif yang valid mengenai pencapaian suatu program atau kebijakan.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan menganalisis dan menilai implementasi kebijakan yang berlangsung selama kegiatan berjalan atau ketika kegiatan berakhir dengan tujuan untuk memutuskan apakah keputusan tersebut layak untuk dilanjutkan, dilanjutkan dengan terdapat perbaikan atau dihentikan (Akbar & Mohi, 2018; Prabowo et al., 2022). Sedangkan menurut Affrian (2020) evaluasi kebijakan adalah kegiatan mengenai estimasi atau penilaian terhadap konteks, pelaksanaan dan pengaruh pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Kosowan (2022) hasil dari evaluasi kebijakan digunakan untuk membuat penilaian yang berguna untuk menginformasikan keputusan masa depan tentang pengembangan kebijakan tersebut. Hal senada disampaikan oleh Halimah (2020: 34) bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan penilaian terhadap suatu program yang berasal dari pihak berwenang melalui substansi/isi program, implementasi dan dampak dari kebijakan.

Menurut Gephart bahwa nilai adalah jantung evaluasi, namun evaluasi lebih banyak digunakan untuk menjelaskan usaha atau cara mencari kebenaran pada kebijakan atau program yang sedang berjalan bukan untuk mencari nilai. Sehingga tujuan dari evaluasi kebijakan bukan untuk membuktikan dengan nilai namun untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, ataupun kinerja suatu program atau kebijakan (Hajaroh, 2019).

Mengacu pada uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka evaluasi kebijakan adalah suatu usaha menganalisis guna mencari kebenaran terhadap program yang berasal dari pihak berwenang melalui substansi/isi program, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut sehingga mampu menyediakan informasi yang objektif dan valid mengenai pencapaian suatu program atau kebijakan.

2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Tujuan evaluasi kebijakan dijabarkan sebagai berikut.

- a. Evaluasi berguna untuk mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya (Warman et al., 2021).
- b. Mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan. Setiap kebijakan harus dibuat berdasarkan standar, dengan melakukan evaluasi maka derajat pencapaian standar dan sasaran kebijakan dapat diketahui (Akbar & Mohi, 2018, p. 20; Halimah, 2020).
- c. Mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan audit keefektifan biaya pengeluaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan beserta manfaatnya dapat diketahui (Akbar & Mohi, 2018; Halimah, 2020; Hayat, 2019).
- d. Mengetahui dampak dari kebijakan. Dengan evaluasi maka akan terlihat pengaruh positif dan negatif dari kebijakan terhadap masyarakat sehingga dapat memperbaiki keadaan masyarakat (Akbar & Mohi, 2018; Halimah, 2020; Mergoni & De Witte, 2022).
- e. Sebagai kontrol terhadap kebijakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Akbar & Mohi, 2018; Halimah, 2020).
- f. Sebagai rekomendasi, evaluasi bertujuan untuk mengetahui dampak intervensi eksogen dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat sehingga evaluasi berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan yang akan datang (Akbar & Mohi, 2018; Mergoni & De Witte, 2022).
- g. Eksplanasi, evaluasi bertujuan untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati (Halimah, 2020; Hayat, 2019).

- h. Pengembangan staf program. Evaluasi bertujuan untuk memberikan saran atau masukan kepada manajer program terkait kinerja pegawai dalam mengatasi permasalahan pelanggan (Halimah, 2020).
- i. Kepatuhan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui apakah perilaku para pemegang birokrasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat atau pelaku lainnya yang telah sesuai atau menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku (Halimah, 2020; Hayat, 2019).
- j. Akreditasi program. Evaluasi bertujuan untuk menghadapi tantangan kredibilitas atau akurasi kebijakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa pada suatu lembaga (Al Hudib & Cousins, 2022; Halimah, 2020).
- k. Akuntabilitas. Untuk mengetahui pertanggungjawaban berupa transparansi dari pembuat kebijakan mengenai rencana dan tujuan dari kebijakan yang telah berjalan dengan melihat pengaruh signifikansi dari sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan terhadap akibat sosial-ekonomi dari suatu kebijakan (Al Hudib & Cousins, 2022; Halimah, 2020; Hayat, 2019).
- l. *Feedback* bagi pimpinan dan pegawai. Posavac & Carey menyatakan bahwa evaluasi sebagai tanggapan balik terhadap pelayanan sosial yang telah diberikan (Halimah, 2020).
- m. Menguatkan kedudukan politik. Apabila kebijakan tersebut berdampak positif bagi pemerintah maka kebijakan tersebut akan diteruskan (Halimah, 2020).
- n. Penemuan teori evaluasi baru atau riset evaluasi. Dengan evaluasi maka akan memunculkan adanya teori baru dari para evaluator yang dapat digunakan sebagai dasar teori untuk mendukung penelitian selanjutnya (Halimah, 2020).

3. Waktu dan Kronologi Evaluasi Kebijakan

Ditinjau dari segi waktu dan kronologi perencanaan serta pelaksanaannya evaluasi dibedakan menjadi tiga (Halimah, 2020: 37):

- a. Evaluasi yang dilaksanakan sebelum program dilaksanakan (*pre-programme evaluation*). Evaluasi ini dikenal dengan istilah studi kelayakan.
- b. Evaluasi yang dilaksanakan pada program berjalan (*on going evaluation*). Evaluasi ini berfungsi untuk memberikan saran penyempurnaan pelaksanaan program.
- c. Evaluasi yang dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan atau program telah berjalan cukup lama sehingga telah dicapai hasil – hasil (*output*) tertentu (*ex-post evaluation*).

4. Tipe- tipe evaluasi

Pendapat Langbein yang dikutip oleh Hayat (2018) membagi tipe evaluasi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Tipe Evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) yang merupakan riset yang mendasarkan diri sebagai tujuan kebijakan. Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan berdasarkan tingkat tercapainya tujuan program atau kebijakan.
- b. Evaluasi proses (*proses of public policy implementation*) adalah penelitian evaluasi yang berdasarkan pada petunjuk teknis dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan kebijakan berdasarkan pada kesesuaian proses pelaksanaan dengan petunjuk yang tersedia.

5. Pendekatan-Pendekatan Evaluasi

Untuk memahami evaluasi kebijakan dapat digunakan pendekatan-pendekatan. Jenis-jenis pendekatan evaluasi terhadap suatu kebijakan diungkapkan oleh William Dunn adalah sebagai berikut (Affrian, 2020, p. 10; Firyal & Mohi, 2018, p. 21; Halimah, 2020, p. 37).

- a. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*)
Evaluasi semu adalah evaluasi dengan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya terkait *output* kebijakan dengan tidak memperhatikan tujuan dari hasil tersebut terhadap

keseluruhan masyarakat atau individu karena berasumsi bahwa nilai mengenai tujuan atau hasil adalah sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self-evident*).

b. Evaluasi formal (*formal evaluation*)

Evaluasi formal adalah evaluasi dengan metode deskriptif untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya guna mengevaluasi *output* kebijakan berdasarkan tujuan yang telah dipublikasikan secara formal oleh pembuat kebijakan seperti dokumen undang-undang. Asumsi dari evaluasi formal bahwa tujuan merupakan ukuran yang sesuai untuk menilai suatu kebijakan.

c. Evaluasi keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*).

Evaluasi keputusan teoritis adalah evaluasi dengan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dengan berusaha menunjukkan *eksplisit* tujuan dan target dari pelaku kebijakan yang terselubung atau dimunculkan.

6. Model Evaluasi Kebijakan

Model evaluasi hadir karena terdapat usaha yang terus menerus dilakukan secara konsisten dari proses kemajuan pengukuran dan keinginan manusia untuk menggeneralisasi prinsip-prinsip evaluasi agar menjadi lebih nyata (Mardiah & Syarifudin, 2019).

Sebagai evaluator harus memilih salah satu di antara berbagai model-model evaluasi karena setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan. Mengenai hal tersebut, berikut ini adalah pertimbangan dalam memilih model evaluasi (Halimah, 2020):

- Pertimbangan teknis. Evaluator dalam memutuskan kebijakan yang akan dievaluasi mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi kebijakan tersebut.
- Pertimbangan biaya. Evaluator perlu mempertimbangkan bahwa salah satu jenis evaluasi akan memerlukan biaya yang besar dari model evaluasi yang lainnya.
- Pertimbangan waktu. Evaluator perlu memperhatikan waktu sehingga penelitian yang dilaksanakan tidak tergesa-gesa atau tidak terlalu lama. Oleh karenanya harus dipilih model evaluasi yang sesuai dengan waktu yang tersedia.
- Pertimbangan pemangku kepentingan. Evaluator mempertimbangkan pemilihan model evaluasi sesuai permintaan penyandang dana yang menginginkan model evaluasi tertentu.

Para ahli telah mengembangkan berbagai model evaluasi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Goal – oriented Evaluasi Model* (Model Evaluasi berorientasi Tujuan)

Model evaluasi berbasis tujuan merupakan model evaluasi yang paling awal muncul yang dikembangkan oleh Ralph W. Tyler, model ini memfokuskan pada sejauh mana pencapaian tujuan. Tahapan pelaksanaan model evaluasi ini adalah sebagai berikut: 1) menentukan tujuan, 2) merumuskan indikator, 3) mengembangkan instrumen, 4) memastikan program telah berakhir, 5) menganalisis data, 6) membuat kesimpulan, 7) mengambil kesimpulan (Dilapanga & Rantung, 2022).

b. *Goal – oriented Evaluasi Model* (Model Evaluasi Bebas Tujuan)

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Scriven, evaluasi ini berfokus pada adanya perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang diimplementasikan. Melihat dampak positif dan negatif kemudian membandingkan dengan sebelum kebijakan ini dilaksanakan (Nasihi et al., 2022). Dalam evaluasi ini terdapat tiga jenis dampak atau pengaruh diantaranya: 1) dampak simpangan negatif yaitu dampak yang tidak dikehendaki oleh program, 2) dampak positif yaitu pengaruh yang sesuai dengan tujuan, 3) dampak simpangan positif yaitu dampak positif program diluar pengaruh positif yang telah ditetapkan (Dilapanga & Rantung, 2022) .

c. Model Evaluasi Sumatif dan Formatif

Model evaluasi formatif adalah model evaluasi internal yang dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan program yang sedang dijalankan (*in-progres*) dengan menilai ketercapaian rencana dan berfungsinya semua komponen sesuai tugasnya, jika terdapat hambatan maka perlu dilakukan revisi atau modifikasi. Model evaluasi Sumatif, dilakukan pada akhir program yang dimaksudkan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tugas yang telah diamanatkan, memperoleh informasi mengenai keberhasilan

program yang telah dilaksanakan, memberikan keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan program pada tahun yang akan datang. Evaluasi Sumatif dilakukan dengan menilai ketercapaian tujuan, perubahan yang terjadi, perubahan perilaku yang tampak dan kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan masalah. (Dewantara, 2020).

d. *Countenance Evaluation Model*

Countenance Evaluation Model adalah model evaluasi yang digunakan untuk menentukan tahapan dari suatu proses dan segala hal yang mempengaruhinya. Model evaluasi ini memiliki tiga tahapan yaitu: 1) Tahapan sebelum pelaksanaan program, yaitu dengan melihat keadaan awal program, faktor yang diprediksikan mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan, kompetensi yang dimiliki SDM sebelum kebijakan dilaksanakan. 2) Tahapan saat program dilaksanakan, tahapan ditujukan untuk melihat kesesuaian program yang sedang berjalan dengan tujuan yang ingin dicapai. 3) Tahapan pada akhir kebijakan, tahapan ini digunakan untuk meninjau perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang telah dilaksanakan (Mardiah & Syarifudin, 2019).

e. Model evaluasi Responsif

Model evaluasi responsif adalah model yang diimplementasikan pada kebijakan sosial atau evaluasi pada persoalan yang memerlukan tindakan dengan aspek humaniora. Fokus evaluasi berdasarkan tanggapan dari berbagai pihak atas kebijakan yang dijalankan dengan melihat pengaruh sebab akibat dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dikatakan responsif jika mempunyai kriteria: 1) berpusat kepada aktivitas dari pada tujuan yang telah ditetapkan, 2) memenuhi kebutuhan audiens, 3) pandangan nilai – nilai yang berbeda dari orang dilayani dilaporkan dalam keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan (Dilapanga & Rantung, 2022).

f. *Model evaluasi CIPP*

Context, Input, Process, Product (CIPP) merupakan model evaluasi CIPP berorientasi pada pengambilan keputusan (Affrian, 2020). Evaluasi ini dikembangkan oleh Stufflebeam melalui empat langkah, setiap tahapan evaluasi tersebut memiliki informasi untuk membuat keputusan. 1) Evaluasi konteks bertujuan menginformasikan keputusan perencanaan (*planning decision*), yang bertujuan untuk melihat kondisi kontekstual mengenai harapan masyarakat, visi dan misi dari lembaga yang ingin dievaluasi. 2) Evaluasi input bertujuan menginformasikan keputusan strategi implementasi kebijakan (*structuring decision*), yang bertujuan untuk melihat kapasitas dan kualitas masukan. 3) Evaluasi proses bertujuan menginformasikan keputusan pelaksanaan program berjalan (*implementing decision*), yang bertujuan melihat bagaimana proses kebijaksanaan berjalan. 4) Evaluasi produk, bertujuan menginformasikan kelanjutan program (*recycling decision*) (Rama et al., 2023).

g. *Model Evaluasi CSE-UCLA (Centre for the Study of Evaluation, University California at Los Angeles)*

Model evaluasi CSE- UCLA terdiri atas lima tahapan yang bersifat komprehensif, secara berurutan yaitu: sistem assessmen (*Need Assessment*), perencanaan dan pengembangan (*planning and development*), implementasi (Divayana & Suyasa, 2022).

h. *Discrepancy Evaluation Model (DEM)*

Kata *discrepancy* memiliki arti gap atau kesenjangan, Model evaluasi kesenjangan (*The Discrepancy evaluation model*) dikembangkan oleh Malcom M. Provus, yang mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu seni untuk melukiskan gap antara standar kinerja dengan kinerja yang terjadi (Dilapanga & Rantung, 2022). Evaluasi model *discrepancy* memiliki konsep evaluasi sangat bersih yang mudah diikuti dan akan menghasilkan hasil yang pasti yaitu adanya nilai kesenjangan dari evaluasi (Mustafa, 2021).

Evaluasi yang dikembangkan berfokus pada perbandingan hasil evaluasi dengan per formasi standar yang telah ditentukan. Model *discrepancy* merupakan model yang menonjolkan gap implementasi kebijakan. Model evaluasi berbasis tujuan yang dikembangkan oleh Ralph Tyler mempunyai kesamaan dengan model evaluasi ini. Terdapat 6 langkah yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi *discrepancy* yaitu (Dilapanga & Rantung, 2022; Mustafa, 2021):

- 1) Membuat desain dan standar-standar yang sesuai dengan pelaksanaan kebijakan yang ideal.
- 2) Melakukan rencana evaluasi dengan model evaluasi *discrepancy*.
- 3) Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk membandingkan pelaksanaan kebijakan yang terjadi di lapangan dengan standar pelaksanaan sesuai kebijakan.

- 4) Menemukan kinerja kebijakan diantaranya pelaksanaan program, hasil penemuan data melalui kuantitatif dan kualitatif.
- 5) Menjelaskan dan mengukur gap antara standar kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan yang sesungguhnya.
- 6) Menentukan hambatan yang dialami oleh para pelaku kebijakan dalam mencapai standar kebijakan.
- 7) Membuat perubahan terhadap implementasi kebijakan untuk menghilangkan kesenjangan.

Ketimpangan mencakup pada input, proses dan output pada setiap fase perkembangan program. Evaluasi *discrepancy* berorientasi untuk menilai gap yang terjadi dari standar yang ditetapkan dengan penerapan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selanjutnya informasi yang diperoleh dari yang didapatkan digunakan untuk pengambilan keputusan yang meliputi: mempertahankan, memperbaiki, atau menghentikan program tersebut.

Adapun gap dapat terjadi antara dua atau lebih variabel antara lain sebagai berikut:

- 1) Gap antara perencanaan dengan implementasi kebijakan secara *real*
- 2) Gap antara *predicted* (diprediksi) dengan *obtained* (diperoleh) program *outcomes*
- 3) Gap antara kompetensi yang dimiliki dengan standar kompetensi yang ingin dicapai
- 4) Gap antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai
- 5) Gap antara yang akan dihipotesiskan dengan perubahan program (pendidikan dan atau pelatihan)
- 6) Gap yang terjadi di dalam sistem.

PENUTUP

Evaluasi kebijakan adalah tahapan akhir dari suatu kebijakan yang harus dilakukan evaluasi kebijakan adalah suatu usaha menganalisis guna mencari kebenaran terhadap program yang berasal dari pihak berwenang melalui substansi/isi program, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut sehingga mampu menyediakan informasi yang objektif dan valid mengenai pencapaian suatu program dalam kebijakan. Tujuan evaluasi kebijakan adalah untuk: mengantisipasi perubahan, mengukur tingkat kesesuaian, efektifitas, mengetahui dampak, sebagai kontrol, rekomendasi, eksplanasi, pengembangan staff, kepatuhan, akreditasi, akuntabilitas, memberikan balikan, posisi politik, mengembangkan teori. Ditinjau dari segi waktu dan kronologi evaluasi terdiri atas: *pre-programme*, *on-going* dan *ex-post*. Pendekatan-pendekatan evaluasi terdiri atas: evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan. Model-model evaluasi diantaranya: berorientasi tujuan, bebas tujuan, Sumatif, *countenance*, responsif, CIPP, CSE-UCLA, DEM.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2020). *Buku Penunjang Disertasi*.
- Agustina, R., & T Rahaju. (2021). Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya. *Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 4. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/39118>
- Al Hudib, H., & Cousins, J. B. (2022). Understanding Evaluation Policy and Organizational Capacity for Evaluation: An Interview Study. *American Journal of Evaluation*, 43(2). <https://doi.org/10.1177/10982140211007573>
- Dewantara, Y. (2020). *Evaluasi Kebijakan Program Pendidikan Inkulif*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dilapanga, A., & Rantung, M. (2022). *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Deepublish.
- Divayana, D. G. H., & Suyasa, P. W. A. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Synchronous Berbasis Meet Google Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Model Evaluasi CSE-UCLA. *Lectura : Jurnal Pendidikan*, 13(2). <https://doi.org/10.31849/lectura.v13i2.10534>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <http://dx.doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hajaroh, M. (2019). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *FOUNDASIA*, 9(1). <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>

- Halimah, N. (2020). *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 03 dan SMPN 17 Tangerang Selatan*.
- Hayat. (2019). *Buku Kebijakan Publik*. <https://www.researchgate.net/publication/335788910>
- Kosowan, L., Shannon, S., Rothney, J., Halas, G., Enns, J., Holmqvist, M., Wener, P., Goertzen, L., & Katz, A. (2022). Informing the Physical Activity Evaluation Framework: A Scoping Review of Reviews. *American Journal of Health Promotion*, 36(2), 340–366. https://doi.org/10.1177/08901171211050059/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_08901171211050059-FIG3.JPEG
- Mardiah, M., & Syarifudin, S. (2019). Model-model evaluasi pendidikan. *Mitra ash-shibyan: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 2(1), 38–50. <https://doi.org/10.46963/mash.v2i1.24>
- Mergoni, A., & De Witte, K. (2022). Policy Evaluation and Efficiency: a Systematic Literature Review. *International Transactions in Operational Research*, 29(3), 1337–1359. <https://doi.org/10.1111/ITOR.13012>
- Mustafa, P. (2021). *Model Discrepancy sebagai Evaluasi Program Pendidikan*. *Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*. <https://www.ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa/article/view/1067>
- Nasih, A., Asihati Ratna Hapsari, T., & Kota Jakarta Selatan, K. (2022). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)*, 1(1), 77–88. <https://doi.org/10.56855/INTEL.V1i1.112>
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan publik (teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37. <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Prabowo, R., Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8). <https://doi.org/10.36418/jii.v1i8.298>
- Rama, A., Ambiyar, A., Rizal, F., Jalinus, N., Waskito, W., & Wulansari, R. E. (2023). Konsep model evaluasi context, input, process dan product (CIPP) di sekolah menengah kejuruan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 82. <https://doi.org/10.29210/30032976000>
- Warman, W., Lorensius, L., & Rohana, R. (2021). Curriculum of Management in Improving the Quality of Catholic School Education in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 3677–3688. <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V4i3.2136>